

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini ialah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 kabupaten/kota, namun dengan adanya batasan dalam penelitian ini maka obyek yang diperoleh sebanyak 20 kabupaten/kota.

Jawa Timur merupakat pusat kota dengan pendapatan terbesar setelah Ibu Kota Jakarta, dengan begitu Provinsi Jawa Timur memiliki turut andil dalam menyumbang pendapatan dari negara ini dalam membiayai belanja negaranya. Selain itu prestasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun berturut-turut, dibuktikan dengan prestasi gemilang di tingkat nasional yaitu penghargaan berupa pemeringkatan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD). Sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada posisi tertinggi dengan skor 3,1482 (Surya, Jumat 26 April 2013).

4.1.2. Data Penelitian

Data pada penelitian ini (n) sebanyak 60, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Tahun 2010 hingga 2012. Pengambilan data-data penelitian disesuaikan dengan batasan penelitian yang ada, pada tabel 4.1 memuat tentang prosedur penentuan sampel.

Tabel 4.1
Prosedur Penentuan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Populasi 2010 – 2012	114
2.	Sampel Memenuhi Syarat 2010 - 2012	60
3.	Sampel Tidak Memenuhi Syarat	54

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Dengan dilakukan penelitian selama tiga tahun (2010-2012) maka diperoleh populasi penelitian sebanyak 114. Namun dengan adanya batasan-batasan pada penelitian ini maka jumlah sampel yang dapat memenuhi batasan tersebut sebanyak 20 kabupaten/kota dan disesuaikan dengan jumlah tahun dilakukan penelitian sehingga diperoleh 60 sampel. Sedangkan jumlah sampel yang tidak sesuai dengan batasan penelitian sebanyak 54 sampel. Berikut data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Data Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banyuwangi
2.	Kabupaten Jember
3.	Kabupaten Lamongan
4.	Kabupaten Madiun
5.	Kabupaten Magetan
6.	Kabupaten Malang
7.	Kabupaten Nganjuk
8.	Kabupaten Ngawi
9.	Kabupaten Pamekasan
10.	Kabupaten Ponorogo
11.	Kabupaten Probolinggo
12.	Kabupaten Sidoarjo
13.	Kabupaten Trenggalek
14.	Kabupaten Tuban
15.	Kabupaten Tulungagung
16.	Kota Batu
17.	Kota Blitar
18.	Kota Malang
19.	Kota Mojokerto
20.	Kota Surabaya

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari pemaparan tabel 4.2, sampel yang dapat digunakan sebagai data penelitian ialah 15 kabupaten dan 5 kota yang terdapat di Jawa Timur. Data-data tersebut dimuat dalam situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimulai dari tahun 2010 hingga 2012, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah yang diperoleh dari (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).

4.1.3. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan alat uji yaitu SPSS 16.0 *for windows*, untuk pengujian analisis statistik deskriptif. Analisis ini berguna untuk

mengetahui karakter sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2006). Langkah selanjutnya untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik sampel yang digunakan secara rinci, dapat dilihat nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum variabel independen (PAD dan DAU) dan variabel dependen (BD) dalam penelitian ini yang terjadi selama tahun 2010-2012. Berikut ialah data-data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 terdapat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

Kota/Kabupaten	2010		
	PAD	DAU	BELANJA DAERAH
Kab. Banyuwangi	90.065.600.905	761.897.000.000	1.219.931.000.614
Kab. Jember	150.935.000.737	955.007.000.373	1.503.014.000.965
Kab. Lamongan	95.244.807.228	606.700.000.000	1.044.489.166.449
Kab. Madiun	45.034.305.946	476.031.000.395	769.219.684.703
Kab. Magetan	51.964.929.106	503.707.000.903	735.704.240.755
Kab. Malang	130.465.915.607	967.107.349.000	1.654.298.910.348
Kab. Nganjuk	79.507.391.649	598.046.000.354	940.179.414.189
Kab. Ngawi	27.489.942.064	572.965.000.157	873.716.733.308
Kab. Pamekasan	49.313.077.417	475.711.000.035	754.566.678.104
Kab. Ponorogo	48.664.624.186	563.867.637.000	908.838.285.103
Kab. Probolinggo	39.550.000.000	142.213.000.000	125.457.000.000
Kab. Sidoarjo	460.539.000.000	1.220.620.000.000	1.752.008.000.000
Kab. Trenggalek	53.553.783.139	472.359.000.819	799.556.660.994
Kab. Tuban	18.032.000.000	14.821.000.000	119.278.000.000
Kab. Tulungagung	94.380.356.787	648.991.000.116	1.099.341.172.342
Kota Batu	17.735.602.953	83.704.902.808	116.639.000.036
Kota Blitar	47.690.974.774	223.964.000.245	417.915.452.456
Kota Malang	113.490.265.808	494.910.000.987	967.903.242.519
Kota Mojokerto	31.596.313.387	244.969.000.563	403.716.058.238
Kota Surabaya	1.293.776.000.000	1.141.932.000.000	3.634.230.000.000

Sumber: Data Primer diolah, 2013, [www. Djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2010 diperoleh Kota Batu sebesar Rp. 17.735.602.953,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 diperoleh Kota Surabaya sebesar Rp. 1.293.776.000.000,00. Dana Alokasi Umum terendah diperoleh Kabupaten Tuban sebesar Rp. 14.821.000.000,00, sedangkan angka tertinggi sebesar Rp. 1.220.620.000.000,00 diperoleh Kabupaten Sidoarjo. Sehingga belanja daerah tertinggi diperoleh Kota Surabaya sebesar Rp. 3.634.230.000.000,00. Untuk mengetahui lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Kota/Kabupaten	2011		
	PAD	DAU	BELANJA DAERAH
Kab. Banyuwangi	113.364.553.469	815.156.000.279	1.442.970.170.072
Kab. Jember	182.494.390.158	1.058.648.000.472	1.784.063.653.424
Kab. Lamongan	99.545.629.500	679.813.000.015	1.285.411.365.552
Kab. Madiun	57.998.223.512	523.027.000.021	871.703.984.369
Kab. Magetan	61.760.661.908	546.307.000.211	918.770.369.015
Kab. Malang	172.333.275.999	1.048.943.000.562	1.913.349.777.149
Kab. Nganjuk	94.283.242.448	669.591.000.985	1.127.222.290.873
Kab. Ngawi	61.539.122.182	654.412.000.778	1.078.529.191.903
Kab. Pamekasan	70.704.959.013	513.246.000.316	924.137.999.266
Kab. Ponorogo	65.936.673.551	634.409.000.502	1.059.034.980.463
Kab. Probolinggo	75.654.859.911	638.828.000.595	1.112.602.221.082
Kab. Sidoarjo	484.313.737.307	758.701.000.153	1.804.862.168.850
Kab. Trenggalek	63.084.029.481	535.245.000.063	935.917.289.032
Kab. Tuban	137.296.864.044	605.942.000.744	1.057.094.488.311
Kab. Tulungagung	124.517.804.186	723.703.000.537	1.296.018.918.672
Kota Batu	30.241.864.301	273.492.000.029	435.856.317.399
Kota Blitar	52.564.078.517	250.086.000.735	533.328.191.460
Kota Malang	185.818.563.982	533.491.000.887	1.048.167.573.629
Kota Mojokerto	42.165.056.510	265.452.000.147	409.664.911.211
Kota Surabaya	1.886.514.301.580	2.010.445.000.000	3.753.710.413.890

Sumber: Data Primer diolah, 2013, www.djpk.depkeu.go.id

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2011 diperoleh Kota Batu sebesar Rp. 30.241.864.301,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 diperoleh Kota Surabaya sebesar Rp. 1.886.514.301.580,00. Dana Alokasi Umum terendah diperoleh Kota Blitar sebesar Rp. 250.086.000.735,00, sedangkan angka tertinggi sebesar Rp. 2.010.445.000.000,00 diperoleh Kota Surabaya. Sehingga belanja daerah tertinggi diperoleh Kota Surabaya selama dua tahun berturut-turut sebesar Rp. 3.753.710.000.000,00. Untuk mengetahui lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Kota/Kabupaten	2012		
	PAD	DAU	BELANJA DAERAH
Kab. Banyuwangi	192.978.000.000	679.262.000.759	1.675.026.000.000
Kab. Jember	278.424.000.000	1.802.008.000.000	1.941.702.000.000
Kab. Lamongan	97.140.000.000	944.366.000.000	685.691.000.000
Kab. Madiun	144.719.000.000	1.482.587.000.000	1.286.213.000.000
Kab. Magetan	145.671.000.000	1.508.911.000.000	1.319.736.000.000
Kab. Malang	242.472.000.000	2.012.376.000.000	1.891.641.000.000
Kab. Nganjuk	183.756.000.000	1.633.781.000.000	1.487.040.000.000
Kab. Ngawi	135.121.000.000	1.608.394.000.000	1.386.963.000.000
Kab. Pamekasan	157.387.000.000	1.465.926.000.000	1.359.045.000.000
Kab. Ponorogo	161.546.000.000	1.593.597.000.000	1.453.761.000.000
Kab. Probolinggo	16.305.000.000	1.579.007.000.000	1.483.031.000.000
Kab. Sidoarjo	621.619.000.000	1.756.508.000.000	1.943.335.000.000
Kab. Trenggalek	138.433.000.000	1.489.651.000.000	1.263.409.000.000
Kab. Tuban	97.140.000.000	944.366.000.000	685.691.000.000
Kab. Tulungagung	252.483.000.000	1.676.217.000.000	1.672.971.000.000
Kota Batu	124.823.000.000	1.215.006.000.000	9.558.606.000.000
Kota Blitar	141.021.000.000	1.207.510.000.000	994.222.000.000
Kota Malang	259.999.000.000	1.499.305.000.000	1.339.791.000.000
Kota Mojokerto	134.182.000.000	1.201.951.000.000	983.069.000.000
Kota Surabaya	1.759.448.000.000	1.829.054.000.000	3.959.846.000.000

Sumber: Data Primer diolah, 2013, www.djpk.depkeu.go.id

Dapat diketahui dari tabel 4.5 diperoleh Pendapatan Asli Daerah terbesar pada tahun 2012 Rp. 1.759.448.000.000,00 dan Dana Alokasi Umum terbesar Rp. 1.829.054.000.000,00 oleh Kota Surabaya. Sesuai dengan data-data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2012, maka analisis deskriptif pada penelitian ini terdapat pada tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_2010	20	17735602953	1293776000000	146951494584.65	286336362931.34
DAU_2010	20	14821000000	1220620000000	558476144687.75	331607504089.32
BD_2010	20	116639000036	3634230000000	992000135056.15	778404079510.32
PAD_2011	20	30241864301	1886514301580	203106594577.95	408299283745.89
DAU_2011	20	250086000735	2010445000000	686946850401.55	378339118317.10
BD_2011	20	409664911211	3753710413890	1239620813781.10	720313787257.40
PAD_2012	20	16305000000	1759448000000	264233350000.00	371866714168.74
DAU_2012	20	679262000759	2012376000000	1456489150037.95	333559284600.02
BD_2012	20	685691000000	9558606000000	1918539450000.00	1921325735915.90
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 (dalam jutaan rupiah)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

BD : Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah di Jawa Timur pada tahun 2010 diperoleh Kota Batu sebesar Rp. 17.735.602.953,00, tahun 2011 pada Kota Batu sebesar Rp. 30.241.864.301,00 dan tahun 2012 pada Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 16.305.000.000,00. Oleh karena itu kedua kota tersebut masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal pembiayaan belanja daerahnya, sehingga harus meningkatkan PAD dengan terus menggali potensi yang ada di daerahnya secara intensif.

Nilai maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.293.776.000.000,00, tahun 2011 sebesar Rp. 1.886.514.000.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.759.448.000.000,00. Dengan tingkat PAD yang tinggi pada Kota Surabaya maka daerah ini memiliki tingkat kemandirian yang baik dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata (mean) pada tahun 2010 sebesar Rp. 146.951.494.584,65, tahun 2011 sebesar Rp. 203.106.594.577,95, dan tahun 2012 sebesar Rp. 264.233.350.000,00. Nilai standar deviasi pada tahun 2010 Rp. 286.336.362.931,34, tahun 2011 Rp. 408.299.283.745,89, dan tahun 2012 Rp. 371.866.714.168,74.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2010 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 14.821.000.000,00 pada Kabupaten Tuban, tahun 2011 sebesar Rp. 250.086.000.735,00 pada Kota Blitar dan tahun 2012 sebesar Rp. 679.262.000.759,00 pada Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu ketiga kota tersebut memiliki tingkat kemandirian yang baik, karena dana yang

diperoleh dari Pemerintah Pusat untuk pembiayaan belanja daerahnya sangat minim, sehingga ketiga kota tersebut harus terus menggali potensi yang ada di daerahnya agar semakin baik. Nilai maksimal Dana Alokasi Umum pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.220.620.000.000,00 pada Kabupaten Sidoarjo, tahun 2011 sebesar Rp. 2.010.445.000.000,00 pada Kota Surabaya dan tahun 2012 sebesar Rp. 2.012.376.000.000,00 pada Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan ketiga daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian rendah, karena ketergantungan pada Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerahnya besar. Sehingga daerah tersebut harus lebih menggali potensi daerahnya lagi secara baik.

Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata (mean) pada tahun 2010 sebesar Rp. 558.476.144.687,75, tahun 2011 sebesar Rp. 686.946.850.401,55 dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.456.489.150.037,95. Nilai standar deviasi pada tahun 2010 Rp. 331.607.504.089,32, tahun 2011 Rp. 378.339.118.317,10 dan tahun 2012 Rp. 333.559.284.600,02.

Belanja Daerah pada tahun 2010 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 116.639.000.036,00 pada Kota Batu, tahun 2011 sebesar Rp. 409.664.911.211,00 pada Kota Mojokerto dan tahun 2012 sebesar Rp. 685.691.000.000,00 pada Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan ketiga daerah tersebut memiliki pos belanja daerah yang sedikit. Nilai maksimal sebesar tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp. 3.634.230.000.000,00 dan Rp. 3.753.710.413.890,00 oleh Kota Surabaya, dan tahun 2012 sebesar Rp. 9.558.606.000.000,00 oleh Kota Batu. Hasil

penelitian menunjukkan Belanja Daerah tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kota Surabaya dan Kota Batu. Dengan begitu kedua kota tersebut memiliki tingkat kemampuan yang baik dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Belanja Daerah memiliki rata-rata (mean) pada tahun 2010 sebesar Rp. 992.000.135.056,15, tahun 2011 sebesar Rp. 1.239.620.813.781,10 dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.918.539.450.000,00. Nilai standar deviasi pada tahun 2010 Rp. 778.404.079.510,32, tahun 2011 Rp. 720.313.787.257,40 dan tahun 2012 Rp. 1.921.325.735.915,90.

4.1.4. Pengujian Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Alat uji pada penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 *for windows*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* terhadap nilai residual hasil persamaan regresi serta metode grafik normal PP-plot. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,15967424
Most Extreme Differences	Absolute	,157
	Positive	,157
	Negative	-,107
Kolmogorov-Smirnov Z		1,218
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103

a. Test distribution is Normal.

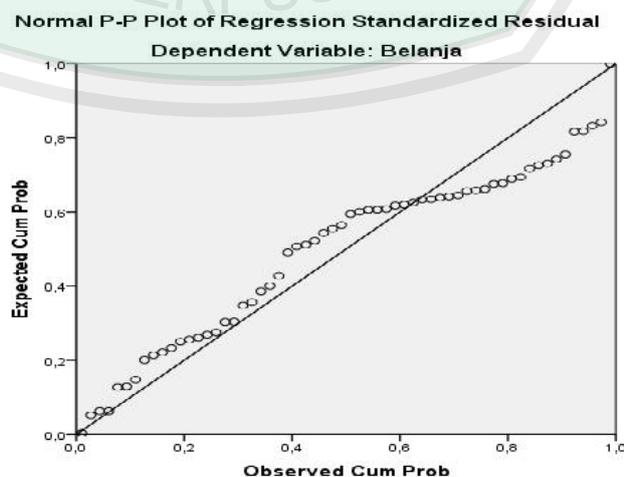
b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.7 diketahui bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas tersebut terpenuhi (Ghazali, 2006).

Jika menggunakan grafik PP-Plot dapat dilihat bahwa titik-titik dari data mendekati garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut menyebar secara normal. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dengan menggunakan normal PP-Plot pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik data berada di sekitar garis diagonal regresi maka dinyatakan bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Baik menggunakan pengujian statistik, *Kolmogrof Smirnov* maupun normal PP-Plot didapatkan bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Alat uji pada penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 *for windows*, pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dideteksi dari besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Bila nilai VIF tidak lebih dari 10 ($VIF < 10$) maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005). Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas seperti yang tercantum sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,543	1,843
DAU	,543	1,843

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya (Ghozali, 2005). Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji *Durbin-Watson*. Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* dengan bantuan *software SPSS 16.0 for Windows* yang telah dilakukan, berikut hasilnya pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,869 ^a	,756	,747	,16245	1,921

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < DW < (4 - dU)$
2. Terjadi autokorelasi positif jika $DW < dL$
3. Terjadi autokorelasi negatif jika $DW > (4 - dU)$

4. Tanpa keputusan jika $dL < DW < dU$ atau $(4 - dU) < DW < (4 - dL)$

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.9 diketahui bahwa $dL < dw < 4-du$ ($1,652 < 1,921 < 2,348$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.1.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini digunakan metode *Park Gleyser*, dengan menggunakan metode ini gejala heterokedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel *independent* terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya $>$ nilai alfanya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heterokedastisitas (Santoso, 2005).

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,175	,514		,341	,735
1 PAD	-,026	,049	-,093	-,518	,606
DAU	,018	,058	,056	,309	,758

a. Dependent Variable: abs_residual

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Signifikansi dari PAD dan DAU yang diperoleh dari tabel signifikan lebih besar dari taraf nyata yaitu 0.05. Maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat (Santoso, 2005). Berdasarkan perhitungan statistik dengan alat uji *SPSS 16.0 for Windows*, tampak bahwa hasil analisis regresi linier berganda terdapat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Analisis Regresi Linier Berganda PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Standardized Coefficients	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	2,871		4,041	0,000	Signifikan
PAD (X ₁)	0,281	0,376	4,405	0,000	Signifikan
DAU (X ₂)	0,511	0,578	6,782	0,000	Signifikan
hitung	R ² = 0,748				
	F = 84,734				
	F table = 3,159				
	Sig. F = 0,000				
	t table = 2,002				
	= 0,005				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.11 analisis regresi linier berganda dengan variabel terikat pada regresi ini adalah Belanja Daerah (Y) sedangkan variabel bebasnya adalah PAD (X₁) dan DAU (X₂). Model regresi berdasarkan hasil analisis ialah:

$$Y = 2,871 + 0,281 X_1 + 0,511 X_2$$

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. $b_0 = 2,871$

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas (PAD dan DAU) maka variabel Belanja Daerah adalah sebesar 2,871. Dalam arti kata Belanja Daerah meningkat sebesar 2,871 sebelum atau tanpa adanya variabel PAD dan DAU (dimana X_1 dan $X_2 = 0$).

2. $b_1 = 0,281$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel PAD meningkat Rp 1, maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,281 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Belanja Daerah dibutuhkan variabel PAD sebesar 0,281 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap ($X_2 = 0$).

3. $b_2 = 0,511$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel DAU meningkat Rp 1, maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,511 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Belanja Daerah dibutuhkan variabel DAU sebesar 0,511 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap ($X_1 = 0$).

Berdasarkan tabel regresi di atas diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,748 atau 74,8%. Artinya bahwa keragaman variabel Belanja Daerah dipengaruhi oleh 74,8% variabel bebas PAD dan DAU. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 25,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

4.1.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji *t*)

Uji *t* digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu PAD (X_1) dan DAU (X_2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Belanja Daerah (Y), serta untuk melihat variabel bebas manakah yang paling dominan pengaruhnya. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0: b_i = 0$$

Variabel bebas (X_1 dan X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

$$H_a: b_i \neq 0$$

Variabel bebas (X_1 dan X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas (X_1 dan X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas (X_1 dan X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel PAD (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,405 (tabel 4.11) dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ ($4,405 > 2,002$) atau $\text{sig. } t < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y) dengan pengaruh parsial sebesar (R^2) 27,7%.
- Variabel DAU (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,782 (tabel 4.11) dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ ($6,782 > 2,002$) atau $\text{sig. } t < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel DAU (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y) dengan pengaruh parsial sebesar (R^2) 48,0%.

Untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan nilai Koefisien Beta (*Beta Coefficient*), koefisien tersebut *standardized coefficient*. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel DAU (X_2) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,578. Jadi dapat disimpulkan

bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Belanja Daerah adalah variabel DAU.

4.1.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu PAD (X_1) dan DAU (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Belanja Daerah di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} hasil analisis regresi dengan nilai F_{tabel} pada taraf nyata $= 0,05$. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0: b_i = 0$$

Variabel bebas (X_1 dan X_2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

$$H_a: b_i \neq 0$$

Variabel bebas (X_1 dan X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas (X_1 dan X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas (X_1 dan X_2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel regresi di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 84,734 (tabel 4.11). Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} ($84,734 > 3,159$) dan nilai sig. F lebih kecil dari (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) dan DAU (X_2) secara simultan memiliki pengaruh yang *signifikan* terhadap Belanja Daerah (Y).

4.1.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk persentase dari variabel bebas atau independen (Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan Dana Alokasi Umum atau DAU) terhadap variabel terikat atau dependen (Belanja Daerah). Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2).

Hasil perhitungan SPSS uji R^2 diatas menunjukkan bahwa nilai R *Square* sebesar 0,748 (tabel 4.11), ini dapat diartikan bahwa Belanja Daerah Jawa Timur adalah sebesar 74,8% ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan Dana Alokasi Umum atau DAU sedangkan sisanya sebesar 25,2% ($100\% - 74,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.1.6. Analisis Kinerja Keuangan

4.1.6.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *eksternal* (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, demikian pula sebaliknya (Halim, 2004). Rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tahun 2010-2012, dapat dilihat pada tabel 4.12, 4.13 dan 4.14. Berikut tabel 4.12 rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Timur beserta ilustrasi perhitungannya:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

$$\text{RK}_{\text{Kab. Banyuwangi 2010}} : \frac{\text{Rp. 90.066.000.000}}{\text{Rp. 1.106.441.000.000}} \times 100 \%$$

$$= 8,14 \%$$

Kabupaten Banyuwangi memiliki rasio kemandirian sebesar 8,14%, rasio tersebut masih jauh dari angka 100%. Maka dapat dijelaskan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Banyuwangi masih sangat rendah 8,14%, prosentase yang masih jauh dari angka 100%. Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah (Litbang Depdagri-Fispol UGM, 1991):

0,00-10,00	Sangat Kurang	40,01-50,00	Baik
10,01-20,00	Kurang	>50,00	Sangat Baik
20,01-40,00	Cukup		

Menunjukkan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 masih banyak bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Perhitungan lebih lengkap rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 tampak pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	PAD	Pendapatan Transfer	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	90.066	1.106.441	8,14	Sangat Kurang
2	Kab. Jember	150.935	1.339.431	11,27	Kurang
3	Kab. Lamongan	95.245	922.522	10,32	Kurang
4	Kab. Madiun	45.034	740.161	6,08	Sangat Kurang
5	Kab. Magetan	51.965	710.951	7,31	Sangat Kurang
6	Kab. Malang	130.466	1.534.645	8,50	Sangat Kurang
7	Kab. Nganjuk	79.507	861.182	9,23	Sangat Kurang
8	Kab. Ngawi	27.490	824.653	3,33	Sangat Kurang
9	Kab. Pamekasan	49.313	679.134	7,26	Sangat Kurang
10	Kab. Ponorogo	48.665	813.069	5,99	Sangat Kurang
11	Kab. Probolinggo	39.550	655.679	6,03	Sangat Kurang
12	Kab. Sidoarjo	460.539	608.077	75,74	Sangat Baik
13	Kab. Trenggalek	53.554	716.126	7,48	Sangat Kurang
14	Kab. Tuban	18.032	613.520	2,94	Sangat Kurang
15	Kab. Tulungagung	94.380	955.848	9,87	Sangat Kurang
16	Kota Batu	17.736	308.784	5,74	Sangat Kurang
17	Kota Blitar	47.691	348.769	13,67	Kurang
18	Kota Malang	113.490	839.731	13,52	Kurang
19	Kota Mojokerto	31.596	329.996	9,57	Sangat Kurang
20	Kota Surabaya	1.293.776	438.940	294,75	Sangat Baik

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.12 realisasi APBD Jawa Timur pada tahun 2010 dapat diketahui tingkat kemandirian sangat baik (10%) diperoleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 75,74% dan Kota Surabaya dengan prosentase sebesar 294,75% karena prosentasenya melebihi 50%, sedangkan tingkat kemandirian dengan kriteria kurang baik (20%) diperoleh 2 kabupaten dan 2 kota, tingkat prosentase dibawah 20%. Tingkat kemandirian sangat kurang

baik (70%) diperoleh 12 kabupaten dan 2 kota dengan prosentase kemandirian dibawah 10%. Dengan begitu diharapkan bagi daerah/kota yang masih memiliki tingkat kemandirian rendah, agar lebih giat lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Karena tingkat kemandirian juga dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah/kota. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan pemerintah terhadap kekayaan daerah yang tidak produktif sehingga tidak dapat menghasilkan PAD yang maksimal.

Tabel 4.13
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	PAD	Pendapatan Transfer	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	113.365	1.301.627	8,71	Sangat Kurang
2	Kab. Jember	182.494	1.661.280	10,99	Kurang
3	Kab. Lamongan	99.546	1.056.954	9,42	Sangat Kurang
4	Kab. Madiun	57.998	796.865	7,28	Sangat Kurang
5	Kab. Magetan	61.761	885.600	6,97	Sangat Kurang
6	Kab. Malang	172.333	1.775.179	9,71	Sangat Kurang
7	Kab. Nganjuk	94.283	957.995	9,84	Sangat Kurang
8	Kab. Ngawi	61.539	788.037	7,81	Sangat Kurang
9	Kab. Pamekasan	70.705	847.789	8,34	Sangat Kurang
10	Kab. Ponorogo	65.937	986.664	6,68	Sangat Kurang
11	Kab. Probolinggo	75.655	1.058.720	7,15	Sangat Kurang
12	Kab. Sidoarjo	484.314	1.506.878	32,14	Cukup
13	Kab. Trenggalek	63.084	862.317	7,32	Sangat Kurang
14	Kab. Tuban	137.297	1.034.053	13,28	Kurang
15	Kab. Tulungagung	124.518	878.223	14,18	Kurang
16	Kota Batu	30.242	407.573	7,42	Sangat Kurang
17	Kota Blitar	52.564	437.271	12,02	Kurang
18	Kota Malang	185.819	905.837	20,51	Cukup
19	Kota Mojokerto	42.165	358.072	11,78	Kurang
20	Kota Surabaya	1.886.514	1.871.795	100,79	Sangat Baik

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.13 realisasi APBD Jawa Timur pada tahun 2011 dapat diketahui tingkat kemandirian sangat baik (5%) diperoleh Kota Surabaya dengan prosentase sebesar 100,79%, sedangkan tingkat kemandirian cukup baik (10%) diperoleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,68% dan Kota Malang sebesar 20,51% dengan tingkat prosentase dibawah 40%. Tingkat kemandirian kurang baik (25%) diperoleh 3 kabupaten dan 2 kota dengan prosentase dibawah 20%, sedangkan sisanya masih menjadi daerah sangat kurang mandiri (60%) karena prosentasenya masih di bawah 10%. Jika dilihat prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2010, angka prosentase pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan. Meski peningkatan belum terlalu banyak dan tingkat kemandirian masih belum optimal. Penyebab utama ketidak capaian tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada. Kondisi ini mengisaratkan bahwa dana alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi menjadi dominan dalam mengelola belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 nampak pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	PAD	Pendapatan Transfer	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	192.978	1.152.486	16,74	Kurang
2	Kab. Jember	278.424	1.426.773	19,51	Kurang
3	Kab. Lamongan	97.140	801.761	12,12	Kurang
4	Kab. Madiun	144.719	718.202	20,15	Cukup
5	Kab. Magetan	145.671	801.789	18,17	Kurang
6	Kab. Malang	242.472	1.506.885	16,09	Kurang
7	Kab. Nganjuk	183.756	958.735	19,17	Kurang
8	Kab. Ngawi	135.121	874.178	15,46	Kurang
9	Kab. Pamekasan	157.387	701.908	22,42	Cukup
10	Kab. Ponorogo	161.546	871.925	18,53	Kurang
11	Kab. Probolinggo	16.305	641.842	2,54	Sangat Kurang
12	Kab. Sidoarjo	621.619	1.269.713	48,96	Baik
13	Kab. Trenggalek	138.433	743.046	18,63	Kurang
14	Kab. Tuban	97.140	725.208	13,39	Kurang
15	Kab. Tulungagung	252.483	1.019.548	24,76	Cukup
16	Kota Batu	124.823	313.400	39,83	Cukup
17	Kota Blitar	141.021	372.492	37,86	Cukup
18	Kota Malang	259.999	831.436	31,27	Cukup
19	Kota Mojokerto	134.182	339.037	39,58	Cukup
20	Kota Surabaya	1.759.448	358.700	490,51	Sangat Baik

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dilihat dari tabel 4.14 realisasi APBD Jawa Timur pada tahun 2012 dapat diketahui tingkat kemandirian sangat baik (5%) diperoleh Kota Surabaya dengan prosentase sebesar 490,51% selama tiga tahun berturut-turut, sedangkan tingkat kemandirian baik (5%) diperoleh Kabupaten Sidoarjo dengan prosentase diatas 40% yaitu sebesar 48,98%. Tingkat kemandirian cukup baik (35%) mengalami peningkatan dari tahun 2011 hanya 2 daerah menjadi 7 daerah pada tahun 2012 dengan prosentase diatas 20%. Sisanya 10 daerah dengan tingkat kemandirian kurang baik (50%) prosentase di bawah 20% dan 1 daerah dengan tingkat kemandirian sangat kurang baik (5%) yaitu Kabupaten Probolinggo dengan prosentase dibawah

10% yaitu sebesar 2,54%. Dengan begitu diharapkan bagi daerah/kota yang masih memiliki tingkat kemandirian rendah, agar lebih giat lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Bagi daerah yang sudah memiliki tingkat kemandirian baik, diupayakan agar tetap mempertahankan kemandirian bagi daerahnya tersebut.

4.1.6.2 Value For Money

Untuk mengetahui akuntabilitas daerah Jawa Timur maka dapat dilakukan dengan pendekatan *value for money*. Dilakukan perhitungan dari tahun 2010-2012. Berikut ilustrasi perhitungan nilai ekonomis Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Nil. Ek. Kab. Banyuwangi tahun 2010} &= \frac{\text{Rp. 21.096}}{\text{Rp. 24.127}} \times 100\% \\ &= 87\% \end{aligned}$$

Tingkat ekonomi keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan presentase yaitu:

- < 25 % = Sangat ekonomi
- 25% - 50% = Ekonomis
- 50% - 75% = Tidak Ekonomis
- >75% = Sangat Tidak Ekonomis

Tingkat ekonomis dari Kabupaten Banyuwangi diketahui sebesar 87% pada tahun 2010. Karena rasio ini menggambarkan kemampuan

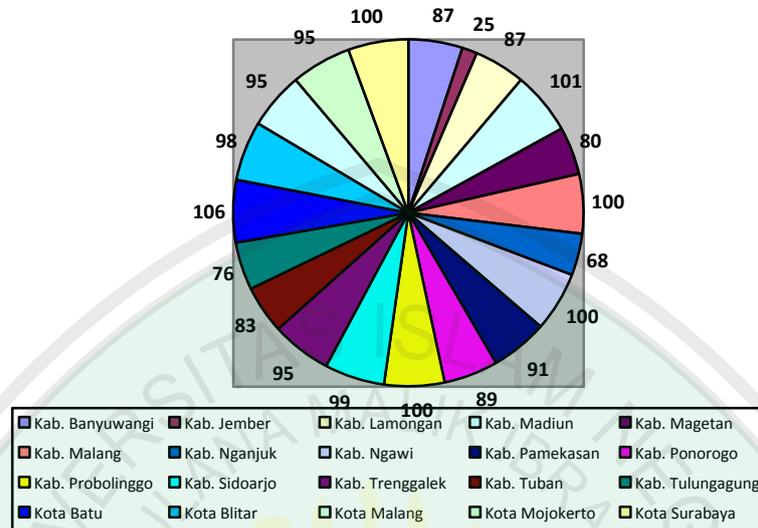
kabupate/kota dalam belanja daerahnya secara maksimal dengan biaya yang terendah. Dengan prosentase Kabupaten Banyuwangi diatas 75% yaitu sebesar 87% maka kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi sangat tidak ekonomis. Karena semakin kecil prosentase yang dimiliki maka daerah tersebut semakin ekonomis. Hasil analisa selengkapnya tingkat pengukuran ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Tingkat Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2010
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	%
1	Kab. Banyuwangi	21.096	24.127	87
2	Kab. Jember	14.556	58.729	25
3	Kab. Lamongan	23.841	27.341	87
4	Kab. Madiun	79.547	78.944	101
5	Kab. Magetan	12.771	15.946	80
6	Kab. Malang	12.919	12.874	100
7	Kab. Nganjuk	5.316	7.762	68
8	Kab. Ngawi	21.672	21.728	100
9	Kab. Pamekasan	10.200	11.215	91
10	Kab. Ponorogo	11.293	12.619	89
11	Kab. Probolinggo	6.332	6.323	100
12	Kab. Sidoarjo	44.995	45.296	99
13	Kab. Trenggalek	2.053	2.155	95
14	Kab. Tuban	16.478	19.809	83
15	Kab. Tulungagung	1.414	1.851	76
16	Kota Batu	8.807	8.304	106
17	Kota Blitar	2.505	2.544	98
18	Kota Malang	21.178	22.178	95
19	Kota Mojokerto	3.675	3.875	95
20	Kota Surabaya	24.996	25.001	100

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013(dalam juta)

Gambar 4.2
Prosentase Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

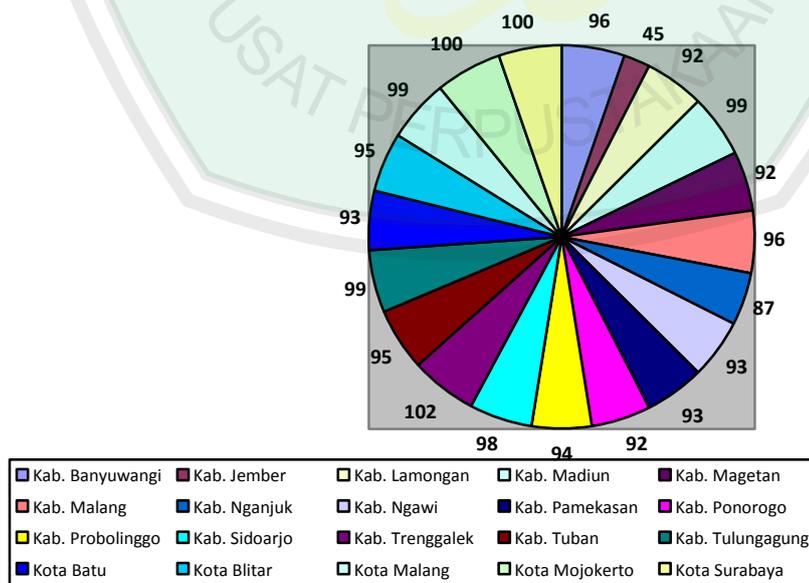
Dapat dilihat dari tabel 4.15 kriteria ekonomis diperoleh Kabupaten Jember dengan tingkat ekonomis sebesar 25% hal ini sesuai dengan kriteria penilaian ekonomis dengan prosentase 25%-50% merupakan daerah yang ekonomis. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Jember telah merealisasikan pengeluarannya secara ekonomis. Dengan begitu diharapkan kepada daerah lainnya untuk tetap meningkatkan tingkat ekonomis sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Tabel 4.16
Tingkat Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	%
1	Kab. Banyuwangi	26.101	27.228	96
2	Kab. Jember	26.383	58.729	45
3	Kab. Lamongan	30.160	32.915	92
4	Kab. Madiun	93.877	94.600	99
5	Kab. Magetan	14.557	15.905	92
6	Kab. Malang	15.225	15.924	96
7	Kab. Nganjuk	12.473	14.290	87
8	Kab. Ngawi	25.216	27.167	93
9	Kab. Pamekasan	14.013	15.008	93
10	Kab. Ponorogo	11.605	12.576	92
11	Kab. Probolinggo	9.702	10.300	94
12	Kab. Sidoarjo	44.337	45.310	98
13	Kab. Trenggalek	3.005	2.950	102
14	Kab. Tuban	18.018	19.055	95
15	Kab. Tulungagung	1.829	1.842	99
16	Kota Batu	9.247	9.925	93
17	Kota Blitar	2.600	2.735	95
18	Kota Malang	27.697	27.864	99
19	Kota Mojokerto	4.375	4.375	100
20	Kota Surabaya	10.961	11.000	100

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013(dalam juta)

Gambar 4.3
Prosentase Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

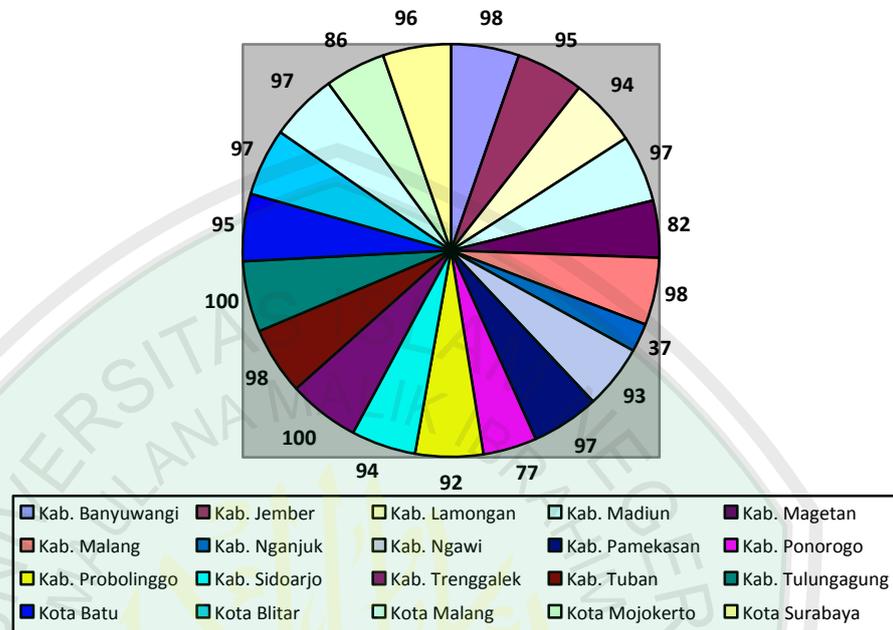
Berikut tingkat ekonomis pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 diperoleh Kabupaten Jember dengan tingkat ekonomis sebesar 45%, sedangkan daerah lainnya masih dalam kriteria sangat tidak ekonomis karena memiliki prosentasi lebih dari 75%. Dengan begitu diharapkan kepada daerah lainnya untuk tetap meningkatkan tingkat ekonomis sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Bagi daerah yang telah memiliki tingkat ekonomis baik diharapkan mampu mempertahankan.

Tabel 4.17
Tingkat Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	%
1	Kab. Banyuwangi	34.685	35.265	98
2	Kab. Jember	27.174	28.551	95
3	Kab. Lamongan	42.659	45.512	94
4	Kab. Madiun	94.293	96.769	97
5	Kab. Magetan	11.227	13.733	82
6	Kab. Malang	17.225	17.550	98
7	Kab. Nganjuk	4.693	12.793	37
8	Kab. Ngawi	25.217	27.217	93
9	Kab. Pamekasan	14.979	15.395	97
10	Kab. Ponorogo	12.081	15.626	77
11	Kab. Probolinggo	8.276	9.025	92
12	Kab. Sidoarjo	47.241	50.200	94
13	Kab. Trenggalek	3.825	3.825	100
14	Kab. Tuban	19.678	20.109	98
15	Kab. Tulungagung	1.982	1.989	100
16	Kota Batu	13.452	14.092	95
17	Kota Blitar	2.877	2.977	97
18	Kota Malang	27.754	28.754	97
19	Kota Mojokerto	4.925	5.750	86
20	Kota Surabaya	15.979	16.578	96

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013(dalam juta)

Gambar 4.4
Prosentase Ekonomis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Tingkat ekonomis Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2012 diperoleh Kabupaten Nganjuk dengan tingkat ekonomis dibawah 50% yaitu sebesar 37%, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih dalam kriteria sangat tidak ekonomis. Dengan begitu diharapkan kepada daerah lainnya untuk tetap meningkatkan tingkat ekonomis sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Bagi daerah yang telah memiliki tingkat ekonomis baik diharapkan mampu mempertahankan.

Berikut perhitungan efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2012. Sebagai ilustrasi perhitungan Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi Kab. Banyuwangi tahun 2010} &= \frac{\text{Rp. 232.563}}{\text{Rp. 1.208.158}} \times 100\% \\ &= 19,25\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari efisiensi adalah pelaksanaan pekerjaan telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang maksimal yang membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah namun yang digambarkan dari kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan perhitungan prosentase 19,25% yang berarti sangat efisien. Sesuai dengan kinerja keuangan berdasarkan prosentase yaitu:

< 25 % = Sangat efisien

25% - 50% = Efisien

50% - 75% = Tidak Efisien

>75% = Sangat Tidak Efisien

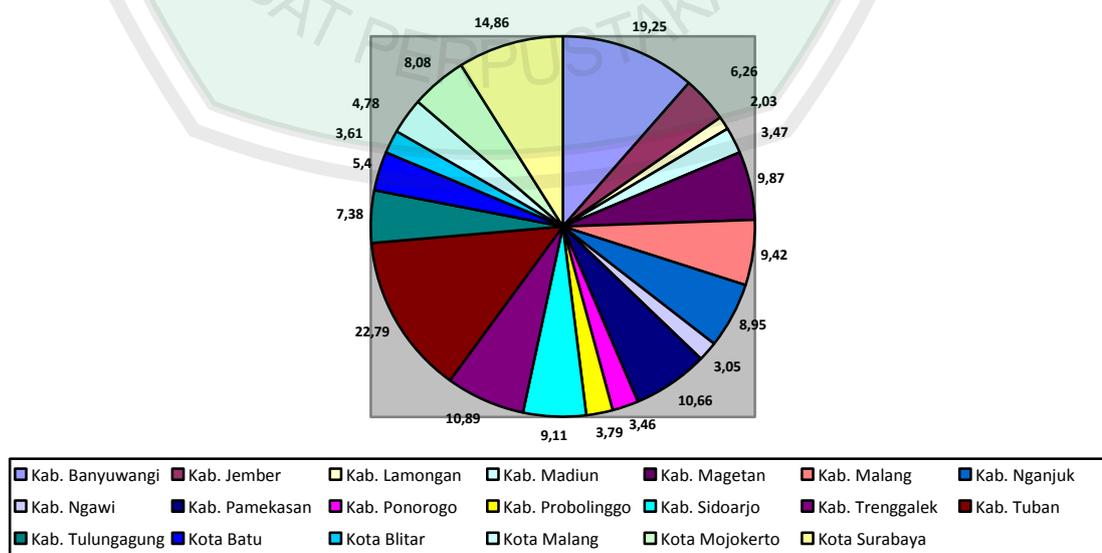
Jadi Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat efisien dalam merealisasikan belanja daerahnya. Untuk mengetahui secara keseluruhan prosentase efisiensi Daerah Jawa Timur pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 4.18, 4.19 dan 4.20. Berikut prosentase efisiensi pada tahun 2010 pada tabel 4.18:

Tabel 4.18
Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Biaya	Realisasi Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	232.563	1.208.158	19,25	Sangat Efisien
2	Kab. Jember	96.419	1.539.990	6,26	Sangat Efisien
3	Kab. Lamongan	21.600	1.064.028	2,03	Sangat Efisien
4	Kab. Madiun	28.900	831.986	3,47	Sangat Efisien
5	Kab. Magetan	79.007	800.187	9,87	Sangat Efisien
6	Kab. Malang	156.828	1.665.126	9,42	Sangat Efisien
7	Kab. Nganjuk	86.851	970.091	8,95	Sangat Efisien
8	Kab. Ngawi	27.072	887.002	3,05	Sangat Efisien
9	Kab. Pamekasan	84.470	792.123	10,66	Sangat Efisien
10	Kab. Ponorogo	31.981	924.089	3,46	Sangat Efisien
11	Kab. Probolinggo	29.877	789.003	3,79	Sangat Efisien
12	Kab. Sidoarjo	140.665	1.543.676	9,11	Sangat Efisien
13	Kab. Trenggalek	86.508	794.523	10,89	Sangat Efisien
14	Kab. Tuban	179.809	788.970	22,79	Sangat Efisien
15	Kab. Tulungagung	81.734	1.107.335	7,38	Sangat Efisien
16	Kota Batu	22.168	410.225	5,40	Sangat Efisien
17	Kota Blitar	15.568	430.870	3,61	Sangat Efisien
18	Kota Malang	47.251	988.288	4,78	Sangat Efisien
19	Kota Mojokerto	31.494	389.754	8,08	Sangat Efisien
20	Kota Surabaya	487.098	3.278.895	14,86	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 (dalam juta)

Gambar 4.5
Prosentase Efisiensi Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

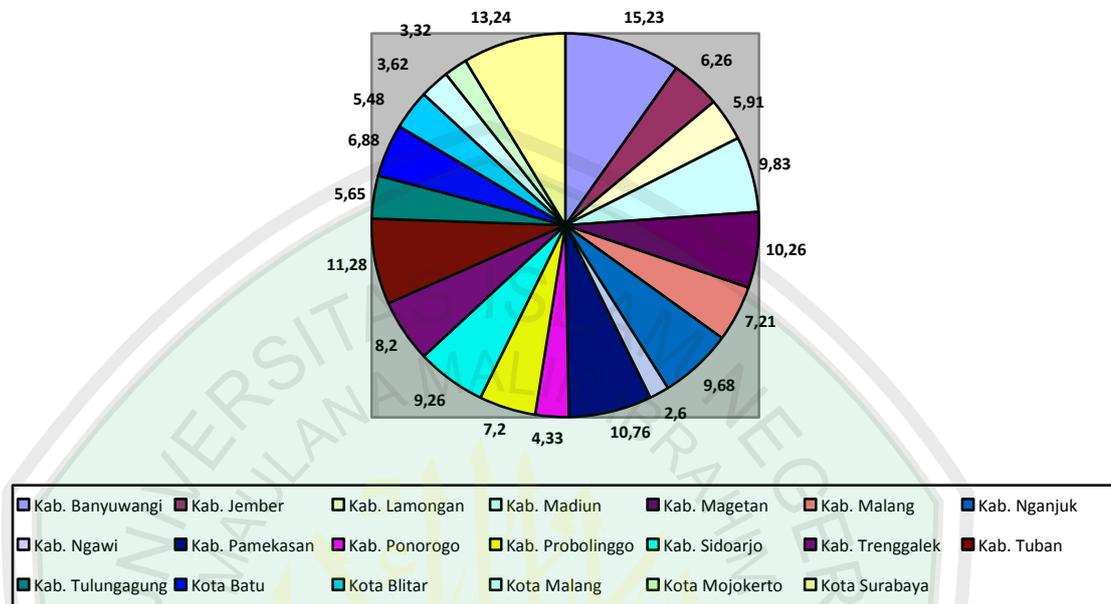
Dapat dilihat dari tabel 4.15 memuat data prosentase tingkat efisien Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sangat efisien karena memiliki prosentase dibawah 25%. Selanjutnya untuk data efisiensi Kabupaten?kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.19:

Tabel 4.19
Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Biaya	Realisasi Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	220.830	1.450.321	15,23	Sangat Efisien
2	Kab. Jember	130.298	1.882.284	6,92	Sangat Efisien
3	Kab. Lamongan	78.130	1.321.525	5,91	Sangat Efisien
4	Kab. Madiun	88.085	896.044	9,83	Sangat Efisien
5	Kab. Magetan	97.684	951.988	10,26	Sangat Efisien
6	Kab. Malang	140.693	1.950.582	7,21	Sangat Efisien
7	Kab. Nganjuk	109.745	1.134.108	9,68	Sangat Efisien
8	Kab. Ngawi	29.391	1.130.521	2,60	Sangat Efisien
9	Kab. Pamekasan	106.642	991.276	10,76	Sangat Efisien
10	Kab. Ponorogo	46.527	1.074.005	4,33	Sangat Efisien
11	Kab. Probolinggo	81.760	1.135.279	7,20	Sangat Efisien
12	Kab. Sidoarjo	184.397	1.991.191	9,26	Sangat Efisien
13	Kab. Trenggalek	77.714	948.218	8,20	Sangat Efisien
14	Kab. Tuban	133.097	1.180.212	11,28	Sangat Efisien
15	Kab. Tulungagung	75.234	1.332.422	5,65	Sangat Efisien
16	Kota Batu	30.708	446.028	6,88	Sangat Efisien
17	Kota Blitar	28.764	525.195	5,48	Sangat Efisien
18	Kota Malang	39.875	1.102.656	3,62	Sangat Efisien
19	Kota Mojokerto	14.734	444.049	3,32	Sangat Efisien
20	Kota Surabaya	497.675	3.759.034	13,24	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 (dalam juta)

Gambar 4.6
Prosentase Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

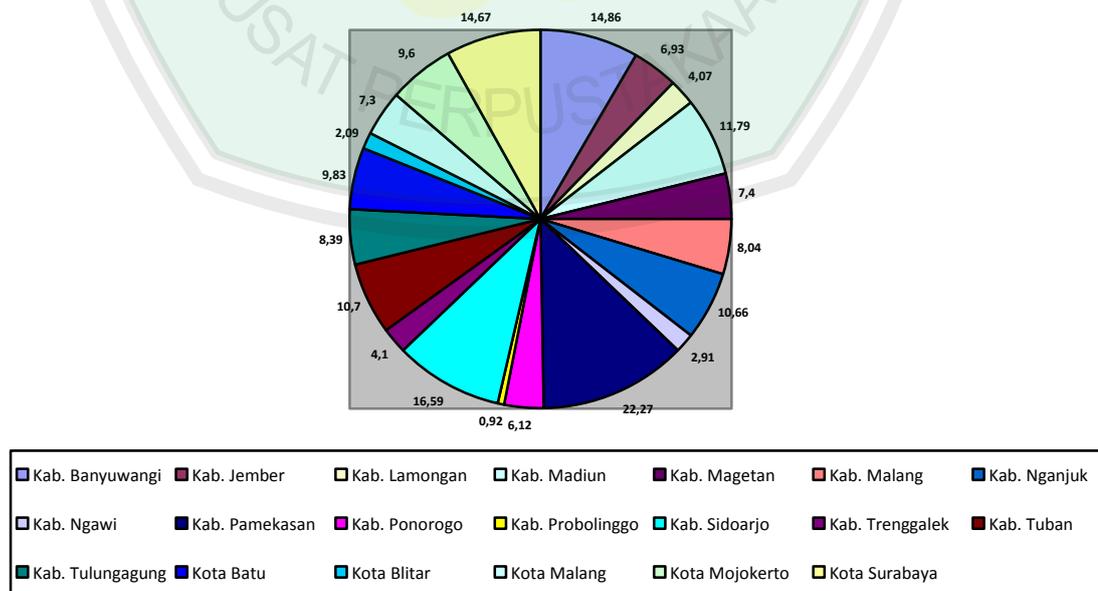
Tingkat efisiensi daerah Jawa Timur pada tahun 2011 menghasilkan kriteria yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sangat efisien. Karena Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki prosentase kurang dari 25%, sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel 4.19 dan diperjelas lagi dengan gambar 4.6. Hal ini merupakan suatu prestasi bagi Jawa Timur karena memiliki tingkat efisiensi yang baik. Berikut efisiensi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 nampak pada tabel 4.20.

Tabel 4.20
Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Biaya	Realisasi Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	194.262	1.307.445	14,86	Sangat Efisien
2	Kab. Jember	113.272	1.635.368	6,93	Sangat Efisien
3	Kab. Lamongan	58.996	1.447.881	4,07	Sangat Efisien
4	Kab. Madiun	93.385	792.090	11,79	Sangat Efisien
5	Kab. Magetan	62.961	850.330	7,40	Sangat Efisien
6	Kab. Malang	137.500	1.710.912	8,04	Sangat Efisien
7	Kab. Nganjuk	114.748	1.076.482	10,66	Sangat Efisien
8	Kab. Ngawi	27.770	953.061	2,91	Sangat Efisien
9	Kab. Pamekasan	177.784	798.396	22,27	Sangat Efisien
10	Kab. Ponorogo	59.692	975.992	6,12	Sangat Efisien
11	Kab. Probolinggo	9.068	983.251	0,92	Sangat Efisien
12	Kab. Sidoarjo	297.660	1.794.282	16,59	Sangat Efisien
13	Kab. Trenggalek	33.439	815.427	4,10	Sangat Efisien
14	Kab. Tuban	143.078	1.336.764	10,70	Sangat Efisien
15	Kab. Tulungagung	104.556	1.246.327	8,39	Sangat Efisien
16	Kota Batu	37.880	385.401	9,83	Sangat Efisien
17	Kota Blitar	8.714	417.573	2,09	Sangat Efisien
18	Kota Malang	76.387	1.046.448	7,30	Sangat Efisien
19	Kota Mojokerto	38.299	398.912	9,60	Sangat Efisien
20	Kota Surabaya	492.144	3.354.060	14,67	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 (dalam juta)

Gambar 4.7
Prosentase Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dapat diketahui tingkat efisien Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 pada tabel 4.20 dan gambar 4.7 bahwa kondisi yang tergambaran ialah sangat efisien. Masing-masing daerah tersebut memiliki prosentase kurang dari 25%.

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 4.5 dapat diketahui efisiensi dalam rentang tiga tahun, yaitu pada tahun 2010 hingga 2012 tujuan dari efisiensi di Provinsi Jawa Timur tercapai. Dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, namun yang digambarkan dari efisiensi kinerja keuangan Daerah Jawa Timur selalu menghasilkan perhitungan persentase < 25% menggambarkan kondisi sangat efisien.

Berikut ilustrasi perhitungan efektivitas Daerah Jawa Timur pada tahun 2010-2012. Sebagai ilustrasi perhitungan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efektifitas Kab. Banyuwangi tahun 2010} &= \frac{\text{Rp. 1.208.158}}{\text{Rp. 1.060.226}} \times 100\% \\ &= 113,95\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Kabupaten Banyuwangi sebesar 113,95%, dalam kriteria penilaian yang ada prosentase efektivitas >75% sangat efektif. Kinerja keuangan berdasarkan presentase yaitu:

< 25 % = Sangat tidak efektif

25% - 50% = Tidak Efektif

50% - 75% = Efektif

>75% = Sangat efektif

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sangat efektif.

Untuk mengetahui secara keseluruhan prosentase efektifitas di Provinsi Jawa

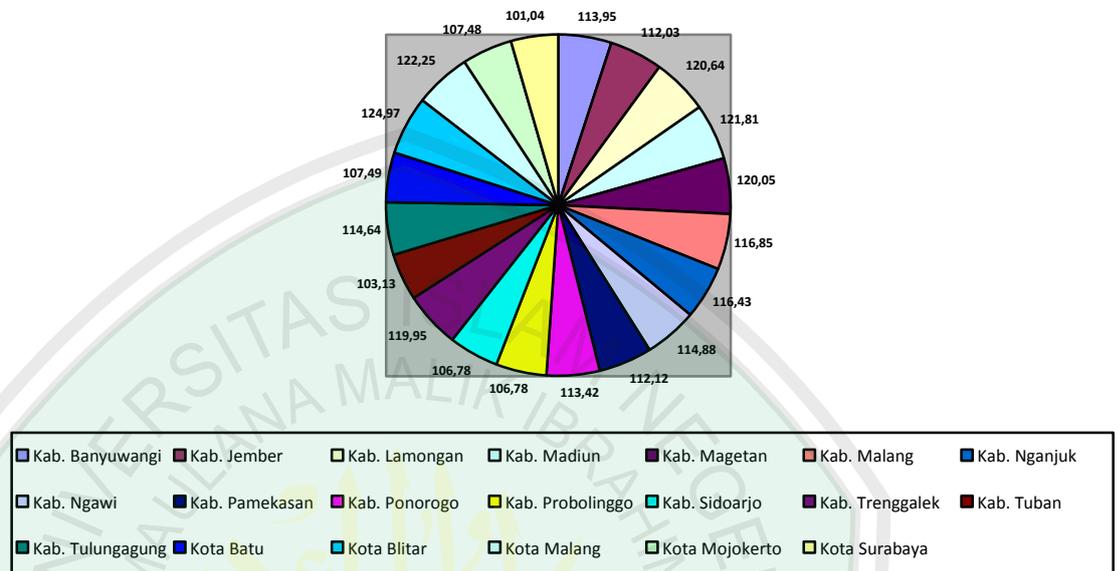
Timur pada tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.21
Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
(dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	1.208.158	1.060.226	113,95	Sangat Efektif
2	Kab. Jember	1.539.990	1.374.593	112,03	Sangat Efektif
3	Kab. Lamongan	1.064.028	881.981	120,64	Sangat Efektif
4	Kab. Madiun	831.986	683.032	121,81	Sangat Efektif
5	Kab. Magetan	800.187	666.548	120,05	Sangat Efektif
6	Kab. Malang	1.665.126	1.425.050	116,85	Sangat Efektif
7	Kab. Nganjuk	970.091	833.185	116,43	Sangat Efektif
8	Kab. Ngawi	887.002	772.114	114,88	Sangat Efektif
9	Kab. Pamekasan	792.123	706.470	112,12	Sangat Efektif
10	Kab. Ponorogo	924.089	814.777	113,42	Sangat Efektif
11	Kab. Probolinggo	789.003	738.900	106,78	Sangat Efektif
12	Kab. Sidoarjo	1.543.676	1.445.670	106,78	Sangat Efektif
13	Kab. Trenggalek	794.523	662.363	119,95	Sangat Efektif
14	Kab. Tuban	788.970	765.056	103,13	Sangat Efektif
15	Kab. Tulungagung	1.107.335	965.950	114,64	Sangat Efektif
16	Kota Batu	410.225	381.642	107,49	Sangat Efektif
17	Kota Blitar	430.870	344.777	124,97	Sangat Efektif
18	Kota Malang	988.288	808.411	122,25	Sangat Efektif
19	Kota Mojokerto	389.754	362.622	107,48	Sangat Efektif
20	Kota Surabaya	3.278.895	3.245.087	101,04	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 (dalam juta)

Gambar 4.8
Prosentase Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

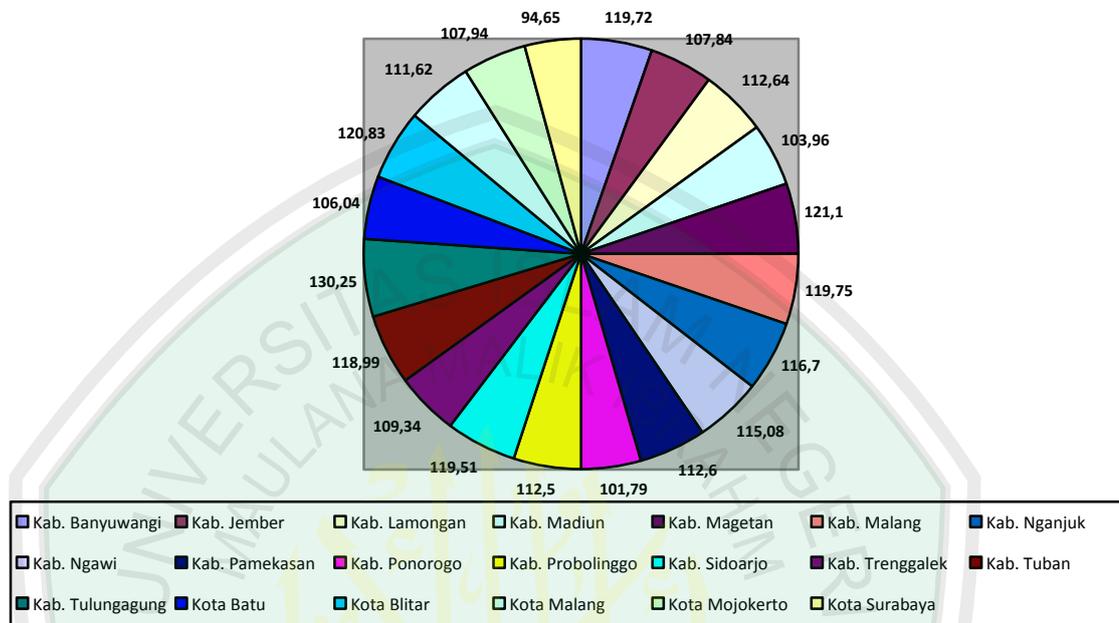
Berdasarkan data pada tabel 4.21 dan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sangat efektif. Hal ini terlihat dari prosentase yang diperoleh setiap kabupaten dan kota lebih dari 75%, sehingga prestasi yang telah diraih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun tersebut harus dipertahankan karena mampu sebagai acuan bagi daerah-daerah di Indonesia lainnya. Berikut tingkat efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 pada tabel 4.22:

Tabel 4.22
Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Jawa Timur Tahun 2011 (dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	1.450.321	1.211.464	119,72	Sangat Efektif
2	Kab. Jember	1.882.284	1.745.394	107,84	Sangat Efektif
3	Kab. Lamongan	1.321.525	1.173.178	112,64	Sangat Efektif
4	Kab. Madiun	896.044	861.906	103,96	Sangat Efektif
5	Kab. Magetan	951.988	786.108	121,10	Sangat Efektif
6	Kab. Malang	1.950.582	1.628.821	119,75	Sangat Efektif
7	Kab. Nganjuk	1.134.108	971.791	116,70	Sangat Efektif
8	Kab. Ngawi	1.130.521	982.336	115,08	Sangat Efektif
9	Kab. Pamekasan	991.276	880.348	112,60	Sangat Efektif
10	Kab. Ponorogo	1.074.005	1.055.149	101,79	Sangat Efektif
11	Kab. Probolinggo	1.135.279	1.009.166	112,50	Sangat Efektif
12	Kab. Sidoarjo	1.991.191	1.666.122	119,51	Sangat Efektif
13	Kab. Trenggalek	948.218	867.257	109,34	Sangat Efektif
14	Kab. Tuban	1.180.212	991.878	118,99	Sangat Efektif
15	Kab. Tulungagung	1.332.422	1.022.966	130,25	Sangat Efektif
16	Kota Batu	446.028	420.631	106,04	Sangat Efektif
17	Kota Blitar	525.195	434.651	120,83	Sangat Efektif
18	Kota Malang	1.102.656	987.864	111,62	Sangat Efektif
19	Kota Mojokerto	444.049	411.384	107,94	Sangat Efektif
20	Kota Surabaya	3.759.034	3.971.689	94,65	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013(dalam juta)

Gambar 4.9
Prosentase Efektifitas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

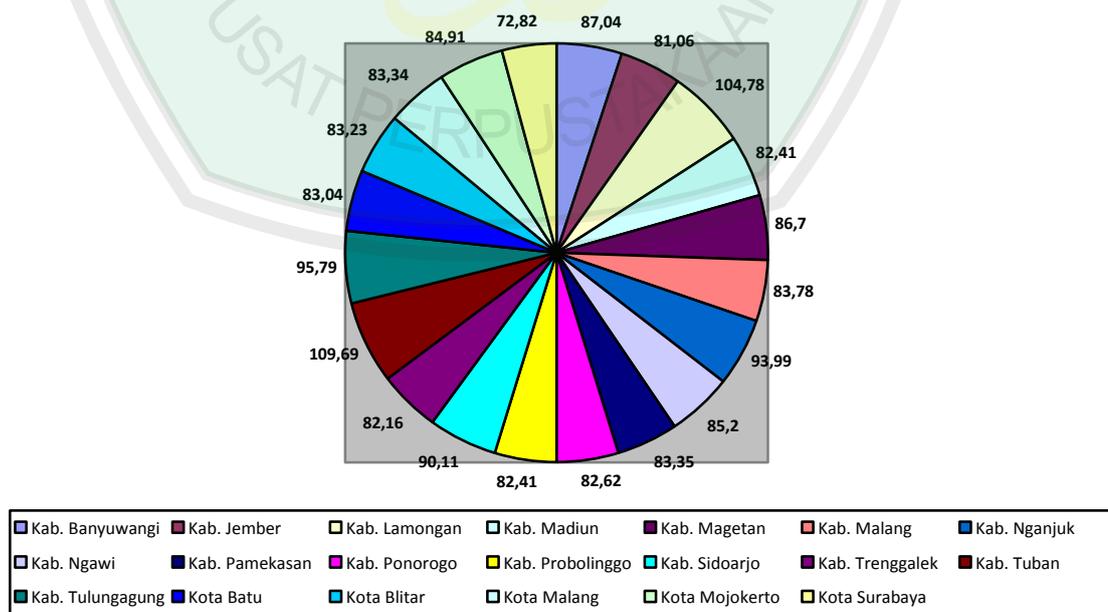
Berdasarkan data pada tabel 4.22 dan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sangat efektif. Hal ini terlihat dari prosentase yang diperoleh setiap kabupaten dan kota lebih dari 75%, sehingga prestasi yang telah diraih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun tersebut harus dipertahankan karena mampu sebagai acuan bagi daerah-daerah di Indonesia lainnya. Berikut tingkat efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 pada tabel 4.23:

Tabel 4.23
Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Jawa Timur Tahun 2012 (dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Keterangan
1	Kab. Banyuwangi	1.307.445	1.502.196	87,04	Sangat Efektif
2	Kab. Jember	1.635.368	2.017.506	81,06	Sangat Efektif
3	Kab. Lamongan	1.447.881	1.381.852	104,78	Sangat Efektif
4	Kab. Madiun	792.090	961.124	82,41	Sangat Efektif
5	Kab. Magetan	850.330	980.806	86,70	Sangat Efektif
6	Kab. Malang	1.710.912	2.042.115	83,78	Sangat Efektif
7	Kab. Nganjuk	1.076.482	1.145.320	93,99	Sangat Efektif
8	Kab. Ngawi	953.061	1.118.591	85,20	Sangat Efektif
9	Kab. Pamekasan	798.396	957.861	83,35	Sangat Efektif
10	Kab. Ponorogo	975.992	1.181.291	82,62	Sangat Efektif
11	Kab. Probolinggo	983.251	1.193.101	82,41	Sangat Efektif
12	Kab. Sidoarjo	1.794.282	1.991.259	90,11	Sangat Efektif
13	Kab. Trenggalek	815.427	992.544	82,16	Sangat Efektif
14	Kab. Tuban	1.336.764	1.218.687	109,69	Sangat Efektif
15	Kab. Tulungagung	1.246.327	1.301.169	95,79	Sangat Efektif
16	Kota Batu	385.401	464.125	83,04	Sangat Efektif
17	Kota Blitar	417.573	501.729	83,23	Sangat Efektif
18	Kota Malang	1.046.448	1.255.700	83,34	Sangat Efektif
19	Kota Mojokerto	398.912	469.803	84,91	Sangat Efektif
20	Kota Surabaya	3.354.060	4.605.701	72,82	Efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013(dalam juta)

Gambar 5.0
Prosentase Efektifitas Daerah Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa efektifitas berhubungan dengan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya sesuai dengan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan pendapatan daerah dibanding target penerimaan pendapatan daerah, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Daerah Jawa Timur dalam rentang tiga tahun terakhir sangat efektif dalam mengoptimalkan pendapatannya.

4.2 Pembahasan

Dari hasil analisis, pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Maemunah (2006) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. pemerintah kabupaten/kota yang memiliki DAU tinggi, maka pengeluaran sebagai alokasi belanja daerahnya semakin tinggi juga. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula anggaran belanja daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya jumlah alokasi belanja daerah dipengaruhi Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Pengaruh signifikan antara DAU dengan belanja daerah ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja daerah juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Namun kontribusi DAU terhadap belanja daerah masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunan dan pelayanan publiknya sehingga kesejahteraan masyarakatpun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan, contohnya PKL). Sehingga kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, tetapi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Transfer dana alokasi umum merupakan konsekuensi dari

tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan transfer dana alokasi umum adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, telah terbukti secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan asli Daerah terhadap belanja daerah.

Dana alokasi dari pemerintah pusat/provinsi diharapkan setiap tahun mengalami penurunan kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga daerah tersebut akan mandiri melalui dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, namun jika dilihat hasil capaian Pendapatan Asli Daerah dalam persentase selama tiga tahun, kontribusi ini masih rendah dengan kategori tidak optimal, sehingga dana alokasi masih menjadi sumber utama dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui sejauh mana perkembangan kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan presentase yang diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian ini maka semakin tinggi pula ketergantungan terhadap pihak eksternal. Dapat disimpulkan bahwa dalam jangka waktu tiga tahun terakhir angka rasio kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Meski tingkat perkembangannya masih rendah, namun kabupaten/kota di daerah ini mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur semakin mandiri. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun meski hasilnya belum optimal secara keseluruhan. Hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban serta profesionalisme pemerintah daerah dalam mengelola PAD mengalami kenaikan, meski kontribusi tersebut masih banyak mengandalkan dana pemerintah pusat/provinsi dalam bentuk dana alokasi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Tujuan dari efisiensi adalah jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang maksimal yang membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Dengan melihat

hasil penelitian yang menghasilkan perhitungan persentase dibawah 25 % menunjukkan kondisi keuangan kabupaten/kota sangat efisien. Hal ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan atau target tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur memerlukan biaya minim.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas berhubungan dengan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2010-2012 persentase rasio efektivitas lebih dari 100%, artinya kinerja keuangan Pemerintah Jawa Timur tergolong pada kriteria efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sehingga berakibat pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Bastian, 2002). Dengan tercapainya ekonomi, efisien dan

efektif Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2010-2012 maka tujuan Pemerintah Jawa Timur tercapai. Hal ini sejalan dengan prestasi gemilang yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun berturut-turut, lewat penghargaan yang berupa pemeringkatan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2012 untuk peringkat pertama ini harus tetap dipertahankan, sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

